

# EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO

TZEEAH SALSABILLAH PULUKADANG  
NPP 31.0915

*Program Studi Studi Kebijakan Publik Fakultas Politik Pemerintahan*  
email : ziasalsabila321@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Tjahjo Suprajogo, M.Si

## **ABSTRACT**

**Background (GAP):** Indonesia faces several national problems, including the recurring issue of waste management across the country, particularly in Gorontalo City. The Gorontalo City Government has attempted to address this issue by implementing Gorontalo City Regional Regulation Number 12 of 2017 concerning Waste Management. **Objective:** This research aims to evaluate the waste management policy in Gorontalo City. **Method:** Researchers used descriptive qualitative methods to conduct the study on waste management in Gorontalo City. **Results/Findings:** The study found that the Gorontalo City Environmental Service, responsible for environmental issues, has made various efforts to manage waste, such as providing daily waste transportation services in line with Regional Regulation Number 12 of 2017. The Environmental Agency also provides temporary waste management facilities, TPS3R, for sorting waste before it is sent to the Talumelito Regional Landfill. However, the utilization of TPS3R is not optimal, as much of the waste reaching the landfill remains unsorted. The policy faces challenges due to the lack of awareness among residents about waste management and the insufficient number of waste management fleets relative to the number of janitors. **Conclusion:** While the waste management policy in Gorontalo City has made some progress, it is not fully effective due to human resource participation issues and insufficient waste management infrastructure.

**Keywords:** Management, Waste, Human Resources

## **ABSTRAK**

**Latar Belakang (GAP):** Indonesia memiliki beberapa permasalahan nasional yang menjadi perhatian pemerintah dan harus segera ditangani. Salah satu permasalahan yang terjadi di Indonesia setiap tahun adalah permasalahan sampah yang terjadi di seluruh Indonesia termasuk di Kota Gorontalo. Salah satu bentuk upaya Pemerintah Kota Gorontalo dalam menangani masalah sampah adalah menetapkan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah dan mengetahui faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di Kota Gorontalo. **Metode:** Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam melakukan penelitian terkait pengelolaan sampah di Kota Gorontalo. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo,

selaku Pemerintah Daerah yang mengurus masalah lingkungan hidup, telah melakukan berbagai upaya dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Upaya tersebut termasuk memberikan layanan pengangkutan sampah setiap hari sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2017 dan menyediakan fasilitas pengelolaan sampah sementara (TPS3R) sebagai tempat memilah sampah sebelum sampah tersebut berakhir di TPA Regional Talumelito. Namun, pemanfaatan TPS3R di Kota Gorontalo belum maksimal, ditandai dengan banyaknya sampah yang masuk ke TPA Regional Talumelito yang belum dipilah sesuai jenisnya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya partisipasi dari Sumber Daya Manusia di Kota Gorontalo yang masih belum memiliki kesadaran untuk mengelola sampah di TPS3R sebelum dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). **Kesimpulan:** Kebijakan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo belum berjalan optimal karena masih terkendala oleh partisipasi Sumber Daya Manusia yang kurang dan infrastruktur pengelolaan sampah yang belum memadai.

**Kata Kunci:** Pengelolaan, Sampah, Sumber Daya Manusia

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara dan terdiri dari 38 (tiga puluh delapan) Provinsi. Jumlah pulau di Indonesia saat ini tercatat sebanyak 17.508 dan memiliki 5 (lima) pulau utama dan terbesar yaitu Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Dengan luas wilayah keseluruhan sebesar 1,904,569 km<sup>2</sup>, Indonesia memiliki pesona alam yang luar biasa, sering dijadikan destinasi wisata baik oleh wisatawan lokal maupun internasional. Keanekaragaman alam ini mencakup pegunungan, pantai, hutan tropis, dan keindahan bawah laut yang memukau, menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan wisata unggulan di dunia. Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan pariwisata, muncul berbagai tantangan, termasuk permasalahan sampah yang perlu segera ditangani oleh pemerintah dan masyarakat (Arkum et al., 2023).

Indonesia juga dikenal memiliki keragaman tradisi dan budaya yang menjadi warisan turun-temurun dari zaman nenek moyang. Keberagaman budaya di Indonesia terlihat dari berbagai aspek seperti suku bangsa, bahasa daerah, rumah adat, pakaian adat, dan agama. Terdapat 6 (enam) agama yang diakui di Indonesia yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu dengan sekitar 300 etnis yang tersebar di seluruh Nusantara. Walaupun terbagi dalam berbagai keberagaman tradisi, budaya, serta agama, warga negara Indonesia tetap menjunjung tinggi nilai toleransi, sebagaimana tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti "berbeda-beda tetapi tetap satu". Keberagaman ini menjadi kekuatan sekaligus tantangan dalam mengelola isu-isu sosial, termasuk pengelolaan sampah yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai komunitas.

Dibalik keberagaman budaya dan keindahan alam tersebut, Indonesia memiliki beberapa permasalahan nasional yang menjadi perhatian pemerintah dan harus segera ditangani. Salah satu permasalahan yang terjadi di Indonesia setiap tahun adalah permasalahan sampah. Permasalahan



sampah di Indonesia saat ini menjadi masalah umum yang sulit untuk diselesaikan oleh pemerintah. Penyebab sampah di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pertumbuhan penduduk, kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah, terbatasnya sumber daya, penggunaan sampah plastik yang masih sangat tinggi, dan penegakan hukum yang masih lemah. Masalah ini tidak hanya mempengaruhi kebersihan dan estetika lingkungan, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan (Nurlina et al., 2021).

Permasalahan sampah ini membutuhkan upaya serius guna menghindari dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah itu sendiri. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pengelolaan sampah yang meliputi kegiatan mengurangi, mengumpulkan, memindahkan, menyimpan, dan mengolah sampah. Dalam proses ini, keterlibatan banyak pihak mulai dari pemerintah hingga semua elemen masyarakat sangat diperlukan. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur tugas pemerintahan, wewenang pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pengurangan, penanganan sampah, pembiayaan, dan pengelolaan sampah. Implementasi undang-undang ini menjadi dasar bagi berbagai inisiatif lokal dalam menangani permasalahan sampah secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Permasalahan sampah di Indonesia terjadi di beberapa kota besar. Menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan 19,45 juta ton pada tahun 2022. Jawa Tengah menduduki posisi pertama sebagai provinsi penghasil sampah terbesar di Indonesia tahun 2022 dengan 4,3 juta ton, kemudian diikuti Provinsi DKI Jakarta dengan 3,1 juta ton. Masalah sampah tidak hanya terjadi di 10 provinsi tersebut tetapi juga di seluruh provinsi di Indonesia termasuk Provinsi Gorontalo. Provinsi Gorontalo terletak di Pulau Sulawesi dan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Utara. Provinsi Gorontalo terdiri dari 5 Kabupaten yakni Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango, Boalemo, Gorontalo Utara, dan Pohuwato serta 1 Kota yakni Kota Gorontalo dengan luas wilayah keseluruhan sebesar 12.033 km<sup>2</sup>.

Kota Gorontalo sendiri menduduki tempat pertama sebagai daerah penghasil timbulan sampah terbesar di Provinsi Gorontalo tahun 2022-2023 diikuti oleh Kabupaten Gorontalo. Data menunjukkan bahwa timbulan sampah di Kota Gorontalo mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, jumlah timbulan sampah di Kota Gorontalo mencapai 57.506 ton dan meningkat menjadi 58.224 ton pada tahun 2023. Kenaikan timbulan sampah di Kota Gorontalo disebabkan oleh penggunaan barang-barang sekali pakai dan penggunaan sampah plastik yang sulit terurai di alam. Selain itu, kurangnya inovasi pemerintah dalam pengelolaan sampah dan minimnya sarana dan prasarana penunjang pengelolaan sampah juga turut berkontribusi terhadap permasalahan ini.

Masalah sampah di Kota Gorontalo harus segera dikelola karena tumpukan sampah yang tidak ditangani dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan, mengganggu kenyamanan masyarakat, menimbulkan bau tidak sedap, merusak keindahan kota, hingga berdampak pada kesehatan masyarakat yang tinggal di dekat tumpukan sampah. Pengelolaan sampah Kota Gorontalo diatur dalam Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan ini bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun,

pelaksanaan pengelolaan sampah yang disebutkan dalam peraturan ini dinilai belum berjalan dengan baik. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) di Kota Gorontalo yang berjumlah 10 unit tidak berfungsi dengan semestinya, menyebabkan semua sampah yang dihasilkan langsung berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA). Hal ini mempercepat penumpukan sampah di TPA Regional Talumelito yang diperkirakan hanya mampu menampung sampah dalam waktu 2-3 tahun mendatang jika tidak ada perubahan signifikan dalam pengelolaan sampah di tingkat sumber.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Permasalahan sampah di Indonesia, khususnya di Kota Gorontalo, merupakan isu yang kompleks dan mendesak untuk segera diatasi. Berdasarkan data yang ada, Kota Gorontalo mengalami peningkatan timbulan sampah setiap tahunnya, yang pada tahun 2023 mencapai 58.224 ton. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara kebijakan pengelolaan sampah yang telah ditetapkan dan pelaksanaan nyata di lapangan. Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah seharusnya menjadi acuan dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah, namun kenyataannya implementasi kebijakan ini masih jauh dari optimal.

Salah satu kesenjangan utama yang diidentifikasi adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai sosialisasi dan kampanye melalui media sosial, poster, dan kegiatan langsung, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang baik masih rendah. Kebanyakan sampah rumah tangga langsung dibuang tanpa melalui proses pemilahan di TPS3R, sehingga sebagian besar sampah berakhir di TPA Regional Talumelito tanpa melalui proses daur ulang atau pemanfaatan kembali.

Selain itu, sarana dan prasarana penunjang pengelolaan sampah di Kota Gorontalo masih kurang memadai. TPS3R yang ada tidak berfungsi dengan optimal, dan jumlah armada pengangkut sampah serta tenaga kerja kebersihan tidak sebanding dengan volume sampah yang dihasilkan. Hal ini menyebabkan penumpukan sampah di berbagai titik kota dan mempercepat kapasitas penuh TPA.

Kesenjangan lainnya adalah minimnya inovasi dan strategi dari pemerintah dalam pengelolaan sampah. Program-program yang ada belum mampu mengatasi peningkatan timbulan sampah secara efektif. Perlu adanya pendekatan baru dan inovatif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat, untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dan efisien.

Dengan mengidentifikasi kesenjangan-kesenjangan ini, penelitian ini berupaya mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo serta mencari solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai evaluasi kebijakan pengelolaan sampah di berbagai daerah di Indonesia memberikan wawasan mendalam tentang berbagai kendala dan upaya yang telah dilakukan dalam



mengelola masalah sampah. Berikut ini adalah rangkuman dari sepuluh penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

1. **Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Payakumbuh** oleh Okhtafianny T. dan Ariani R. dalam Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi (JEBMA) (2023). Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Payakumbuh berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama dalam implementasi kebijakan ini adalah komunikasi yang kurang optimal antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan masyarakat, serta keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Selain itu, penerapan sanksi yang belum berjalan efektif, rendahnya kesadaran masyarakat, dan kurangnya sosialisasi program juga menjadi faktor penghambat utama (Okhtafianny & Ariani, 2023).
2. **Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan** oleh Hastuti B. D., Anwar F., dan Titi T. D. dalam JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia (2021). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Perda No. 01 Tahun 2017. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan sudah berjalan sesuai standar, pelaksanaannya belum sepenuhnya terealisasi. Kendala utama yang diidentifikasi meliputi komunikasi yang kurang optimal, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, serta struktur birokrasi yang belum mendukung secara penuh (Hastuti et al., 2021).
3. **Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berorientasi Lingkungan Hidup Strategis di Kota Bogor** oleh Soeharsono A., Hamdi M., dan Masrich M. dalam Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan (2023). Penelitian ini menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum optimal, dengan masalah utama pada produktivitas yang rendah, proses implementasi yang tidak sesuai standar, dan penggunaan sumber daya yang belum maksimal. Faktor pendukung termasuk visi misi wali kota dan leadership pimpinan daerah, sementara faktor penghambat mencakup kurangnya komitmen pengelola, minimnya SOP pengelolaan sampah regional, dan rendahnya kesadaran masyarakat (Soeharsono et al., 2023).
4. **Policy Paper Kebijakan Pengelolaan Sampah di Provinsi Bali: Problematika dan Solusi** oleh Wira Utama I. P. dalam Jurnal Penelitian Multidisiplin (2023). Policy paper ini memberikan gambaran tentang kebijakan pengelolaan sampah di Provinsi Bali serta problematika yang terjadi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan data yang diperoleh melalui kajian pustaka, observasi, dan FGD. Solusi yang diusulkan meliputi peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan, pengembangan teknologi pengelolaan sampah, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah (Wira Utama, 2023).
5. **Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bandung (Studi Kasus di Wilayah Pelayanan Sampah Soreang)** oleh Nurlina L., Muhafidin D., dan Sukarno D. dalam JANE - Jurnal Administrasi Negara (2021). Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung belum berjalan efektif. Kendala utama yang diidentifikasi adalah kurangnya komunikasi dengan kelompok target kebijakan, kapabilitas dan konsistensi pelaksana yang masih rendah, serta kelompok target yang sulit

diberikan pemahaman terkait pengelolaan sampah. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan peningkatan aspek komunikasi, pembinaan masyarakat, dan koordinasi antar instansi (Noviyanti et al., 2023).

6. **Dinamika, Problematika, dan Implikasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik di Daerah** oleh Fitri S. E. dan Ferza R. dalam *Jurnal Kebijakan Pembangunan* (2020). Penelitian ini membahas masalah sampah plastik di Indonesia, yang diproyeksikan menjadi salah satu negara penghasil sampah plastik terbesar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan sampah plastik di tingkat daerah belum produktif karena kurangnya sinergi antar kebijakan di berbagai tingkatan pemerintahan. Pemerintah disarankan untuk meningkatkan koordinasi lintas kementerian, integrasi kebijakan riset teknologi, dan optimalisasi forum koordinasi teknis (Fitri & Ferza, 2020).
7. **Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Domestik** oleh Mulasari S. A., Husodo A. H., dan Muhadjir N. dalam *Kesmas: National Public Health Journal* (2014). Penelitian ini mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah domestik di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hasil penelitian menunjukkan bahwa cakupan pelayanan pengelolaan sampah oleh pemerintah kabupaten masih sangat rendah, kecuali Kota Yogyakarta. Kebijakan yang ada telah didukung dengan program layanan, proyek, regulasi, dan insentif khusus, namun metode pemantauan dan evaluasi kebijakan belum dituangkan dalam prosedur baku.
8. **Optimalisasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Pangkalpinang** oleh Arkum D., Handini W., dan Kurniawan R. dalam *Jurnal Studia Administrasi* (2023). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Pangkalpinang dan mencari solusi untuk optimalisasi kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah sampah yang meningkat setiap tahun telah melebihi kapasitas TPA yang ada. Diperlukan peningkatan aspek komunikasi, koordinasi antar instansi, dan partisipasi masyarakat untuk mengatasi masalah ini (Mulasari et al., 2014).
9. **Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi (Studi Kasus di Wilayah Pelayanan Sampah Leuwigajah)** oleh Wijaya H., Nurasa H., dan Susanti E. dalam *JANE - Jurnal Administrasi Negara* (2022). Penelitian ini mengevaluasi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Cimahi berdasarkan teori implementasi kebijakan oleh Michael Hill dan Peter Hupe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap pelaksana kebijakan yang kurang aktif dalam sosialisasi menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Diperlukan adanya reward dan punishment yang jelas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat (Wijaya et al., 2022).
10. **Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Kalikondang Kabupaten Demak** oleh Hardiyanti K., Purnaweni H., dan Sundarso S. dalam *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area* (2021). Penelitian ini menganalisis kesesuaian kebijakan pengelolaan sampah di TPA Kalikondang Kabupaten Demak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah belum optimal, dengan sistem open dumping yang masih digunakan. Kebijakan yang ada belum berjalan sebagaimana mestinya, dan responsivitas terhadap keluhan masyarakat masih rendah. Diperlukan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sampah, termasuk perbaikan fasilitas TPA dan peningkatan frekuensi penimbunan sampah (Hardiyanti et al., 2021).

Dari berbagai penelitian tersebut, terlihat bahwa permasalahan utama dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di berbagai daerah adalah kurangnya komunikasi yang efektif, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Selain itu, kebijakan yang ada sering kali belum diimplementasikan secara konsisten dan optimal, sehingga



diperlukan upaya peningkatan koordinasi antar instansi, sosialisasi yang lebih intensif, dan pengembangan teknologi pengelolaan sampah yang lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo dengan harapan dapat memberikan rekomendasi yang relevan untuk mengatasi permasalahan sampah di daerah tersebut.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian ini mengangkat topik "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo" dengan fokus pada analisis kebijakan lokal dan penerapannya di wilayah tersebut. Kebaruan ilmiah dalam penelitian ini terletak pada beberapa aspek penting yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya.

Pertama, penelitian ini menawarkan perspektif lokal yang spesifik dengan mengkaji kebijakan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menyoroti kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, atau Bandung, sementara penelitian tentang daerah-daerah seperti Gorontalo masih jarang ditemukan. Hal ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami dinamika pengelolaan sampah di kota-kota dengan karakteristik dan tantangan yang berbeda dari kota besar.

Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi kebijakan yang komprehensif dengan menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, survei, serta analisis dokumen kebijakan dan laporan pelaksanaan. Kombinasi metode ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan holistik terhadap efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo.

Ketiga, penelitian ini juga menyoroti peran serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Aspek ini seringkali diabaikan dalam penelitian kebijakan, padahal partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci keberhasilan implementasi kebijakan lingkungan. Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi hambatan dan peluang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, yang dapat menjadi model bagi kota-kota lain yang menghadapi masalah serupa.

Keempat, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan yang berdasarkan bukti dan data lokal yang spesifik. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi panduan praktis bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki sistem pengelolaan sampah, sekaligus berkontribusi pada literatur kebijakan publik dan pengelolaan lingkungan.

#### **1.5 Tujuan**

Untuk mencapai maksud dari latar belakang di atas, peneliti harus mencari banyak informasi guna mencapai tujuan serta mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis beberapa hal penting. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Sekretariat DPRD bagian umum dan keuangan di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Kedua, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Sekretariat DPRD bagian umum dan keuangan di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Ketiga, penelitian ini berupaya untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi faktor-faktor penghambat kinerja Sekretariat DPRD bagian umum dan keuangan di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana kinerja Sekretariat DPRD dapat ditingkatkan, faktor-faktor apa saja yang berpengaruh, serta strategi-strategi apa yang dapat

diterapkan untuk mengatasi hambatan yang ada, sehingga dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih efektif dan efisien.

## II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, sesuai dengan pendekatan yang dijelaskan oleh W. Creswell (2018). Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk mendalami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap kebijakan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo. Metode deskriptif digunakan untuk menyajikan hasil penelitian dengan sistematis, menggambarkan realitas yang terjadi di lapangan terkait implementasi kebijakan tersebut. Pendekatan induktif dan konstruktif dari penelitian ini memungkinkan peneliti untuk membangun pola dan tema berdasarkan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, mencerminkan kondisi yang sesungguhnya (Murdiyanto, 2020).

Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini dilakukan untuk memastikan konsep-konsep yang digunakan dapat dipahami dengan jelas dan data yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian. Dalam tabel operasionalisasi konsep, variabel seperti efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan dievaluasi berdasarkan kriteria Dunn (2003), untuk mengukur sejauh mana kebijakan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo mencapai tujuan yang diinginkan (L.J Moleong, 2022).

Sumber data untuk penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan terkait seperti Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, petugas pengangkut sampah, dan masyarakat umum. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang tersedia seperti arsip Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo dan literatur terkait. Penggunaan teknik purposive sampling dalam pemilihan informan memastikan relevansi informasi dengan fokus penelitian, sementara snowball sampling digunakan untuk memperluas jangkauan informasi tambahan yang dibutuhkan (Bungin, 2007).

Instrumen penelitian yang digunakan meliputi peneliti sendiri sebagai instrumen utama, pedoman wawancara, pedoman observasi, catatan lapangan, dan alat pendukung lainnya seperti buku catatan, ponsel, dan laptop. Teknik pengumpulan data melibatkan observasi non-partisipatif, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi berdasarkan bentuk fisik dan sifatnya, yang semuanya mendukung validitas dan keakuratan data yang dikumpulkan. Teknik analisis data yang digunakan meliputi pemadatan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sesuai dengan prosedur yang dijelaskan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014), untuk memastikan interpretasi yang tepat terhadap temuan penelitian (Rijali, 2019).

Melalui pendekatan holistik ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan perbaikan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo.



### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah berdasarkan Teori Evaluasi oleh William N. Dunn**

Untuk hasil penelitian mengenai evaluasi kebijakan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah di Kota Gorontalo berdasarkan Teori Evaluasi oleh William N. Dunn, terdapat beberapa aspek yang dapat dievaluasi sesuai dengan teori tersebut. Evaluasi ini mencakup aspek efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan kebijakan tersebut.

##### **1. Efektivitas**

Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2017 bertujuan untuk mengatur pengelolaan sampah, termasuk pengangkutan sampah dari berbagai kawasan seperti pemukiman, industri, dan fasilitas umum. Meskipun layanan pengangkutan dilakukan setiap hari atau paling tidak seminggu sekali, evaluasi dari wawancara dengan masyarakat menunjukkan adanya keluhan terkait keterlambatan pengangkutan sampah dan dampak negatifnya terhadap lingkungan saat sampah menumpuk di tempat sementara. Meski demikian, kebijakan ini telah memberikan layanan yang konsisten dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan.

##### **2. Efisiensi**

Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo telah menyediakan sumber daya yang memadai untuk mendukung kebijakan ini. Data menunjukkan adanya 320 petugas kebersihan dan 53 armada pengangkut sampah yang aktif digunakan. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam mencapai efisiensi penuh, terutama terkait dengan keterlambatan pengangkutan sampah yang diakibatkan oleh faktor seperti keterlambatan pembayaran retribusi oleh warga.

##### **3. Kecukupan**

Kebijakan ini berusaha untuk memastikan kecukupan dalam pengelolaan sampah dengan membangun sarana seperti Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan TPS3R untuk mendaur ulang sampah. Meskipun sudah ada fasilitas ini, kesadaran masyarakat dalam memilah sampah masih rendah, yang menyebabkan sebagian besar sampah tidak dipilah sebelum dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Talumelito.

##### **4. Perataan**

Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo telah menyediakan tempat sampah yang dipisahkan untuk sampah organik dan anorganik di berbagai titik kota, termasuk ruang publik seperti pasar dan ruang terbuka hijau. Namun, masih ditemukan masalah dalam penggunaan tempat sampah ini oleh masyarakat, yang sering kali tidak membuang sampah sesuai dengan jenisnya.

##### **5. Responsivitas**

Kebijakan ini telah menunjukkan respons yang baik terhadap keluhan masyarakat terkait masalah lingkungan, seperti penanganan cepat terhadap laporan mengenai sampah menumpuk atau

pohon tumbang. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Gorontalo cepat merespon keluhan masyarakat dengan mengirimkan petugas untuk menangani masalah tersebut secepat mungkin.

## **6. Ketepatan**

Secara keseluruhan, kebijakan pengelolaan sampah ini dinilai tepat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Gorontalo dalam menjaga kebersihan lingkungan. Meskipun masih terdapat beberapa kendala, seperti keterlambatan pengangkutan sampah dan rendahnya kesadaran pemilahan sampah, kebijakan ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam mempermudah penanganan sampah mereka.

Dengan demikian, evaluasi ini memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana kebijakan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo berdasarkan teori evaluasi William N. Dunn. Meskipun sudah ada upaya yang signifikan dari pemerintah daerah, masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan ini, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

### **3.2 Faktor Penghambat Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Gorontalo**

Dalam konteks kebijakan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo, terdapat beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Salah satunya adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). Meskipun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Gorontalo telah menyediakan sejumlah SDM seperti petugas kebersihan, namun evaluasi menunjukkan masih terdapat kendala dalam operasional sehari-hari. Misalnya, meskipun telah ada TPS3R dan Bank Sampah yang disediakan, kesadaran masyarakat akan manfaat ekonomi dari pengelolaan sampah masih rendah, mengurangi efisiensi dan efektivitas dari program tersebut.

Selain SDM, faktor sarana dan prasarana juga menjadi penghambat utama. Meskipun DLH telah menyediakan 53 armada untuk pengangkutan sampah di kota ini, namun evaluasi menunjukkan bahwa jumlah ini masih kurang untuk mengatasi volume sampah yang dihasilkan Kota Gorontalo. Keterbatasan ini menyebabkan proses pengangkutan sampah tidak berjalan optimal, mengakibatkan penumpukan sampah di beberapa lokasi dan potensi pencemaran lingkungan yang meningkat.

Perlu diakui bahwa upaya pemerintah dalam menyediakan sarana seperti tempat sampah yang sesuai di ruang terbuka publik merupakan langkah positif, namun masih banyak masyarakat yang belum disiplin dalam membuang sampah sesuai dengan aturan. Hal ini mengindikasikan bahwa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan agar pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dapat meningkat.

Secara keseluruhan, faktor-faktor penghambat ini menjadi tantangan serius dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo. Diperlukan langkah-langkah strategis lebih lanjut untuk meningkatkan ketersediaan SDM, memperluas sarana dan prasarana, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan kebijakan ini. Dengan demikian, Kota Gorontalo dapat mencapai tujuan kebersihan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan.



### **3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Dalam konteks diskusi mengenai temuan utama penelitian, penting untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang telah diungkap dalam proses penelitian. Temuan utama ini tidak hanya mencerminkan hasil analisis data, tetapi juga menyoroti implikasi serta relevansinya terhadap isu yang diteliti. Sebagai contoh, dalam penelitian tentang kebijakan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo, temuan utama mengenai faktor penghambat menunjukkan bahwa kendala utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan sarana/prasarana.

Pertama, keterlibatan SDM dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo menemui tantangan signifikan. Meskipun Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah melakukan upaya dalam menyediakan personel untuk menangani masalah sampah, evaluasi menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam jumlah dan kualitas SDM yang diperlukan. Pengelolaan sampah memerlukan SDM yang terlatih dan kompeten dalam berbagai aspek, termasuk pengelolaan TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah, Sumberdaya, dan Sarana) serta promosi Bank Sampah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Namun, kekurangan ini menghambat kemampuan DLH dalam memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat, mengakibatkan rendahnya partisipasi dan pemahaman masyarakat terhadap manfaat dari program-program pengelolaan sampah yang telah diterapkan.

Selain itu, faktor sarana dan prasarana juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam konteks kebijakan pengelolaan sampah. Meskipun DLH telah mengalokasikan sejumlah armada untuk pengangkutan sampah, evaluasi menunjukkan bahwa jumlah ini belum cukup untuk menangani volume sampah yang dihasilkan oleh masyarakat Kota Gorontalo. Pengangkutan sampah yang tidak memadai dapat menyebabkan penumpukan sampah di berbagai titik, meningkatkan risiko pencemaran lingkungan, serta mengganggu kenyamanan dan keamanan publik. Oleh karena itu, perlu adanya peninjauan kembali terhadap alokasi sumber daya untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia mencukupi untuk mendukung keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo.

### **3.4 Diskusi Temuan Menarik**

Dalam diskusi mengenai temuan menarik dari penelitian tentang kebijakan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo, terdapat beberapa aspek yang patut diperhatikan. Salah satu temuan menarik adalah terkait dengan perbedaan persepsi antara pemerintah daerah dan masyarakat terkait efektivitas kebijakan yang diterapkan. Meskipun pemerintah daerah, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Gorontalo, telah berupaya keras untuk meningkatkan infrastruktur pengelolaan sampah seperti TPS3R (Tempat Pengelolaan Sampah, Sumberdaya, dan Sarana) dan Bank Sampah, masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap program-program ini. Temuan ini menunjukkan perlunya meningkatkan komunikasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai

manfaat dari pengelolaan sampah yang baik, serta pentingnya keterlibatan aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam mendukung keberhasilan kebijakan ini.

Selain itu, penelitian juga mengungkap bahwa faktor keberlanjutan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo menjadi fokus penting dalam menilai dampak jangka panjang dari implementasi kebijakan tersebut. Meskipun beberapa langkah telah diambil untuk mengurangi volume sampah dan meningkatkan pengelolaan sampah secara efisien, tantangan dalam mempertahankan keberlanjutan ini tidak dapat diabaikan. Diperlukan upaya yang berkelanjutan dari pemerintah daerah untuk memastikan bahwa infrastruktur yang telah dibangun dapat terus berfungsi optimal, sementara masyarakat juga perlu dilibatkan secara aktif dalam menjaga lingkungan bersih dan sehat. Evaluasi terhadap dampak lingkungan dan sosial dari kebijakan ini menjadi penting untuk mengukur efektivitasnya serta menentukan langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan ke depan.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penelitian ini telah mengungkap beberapa temuan krusial terkait dengan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017. Evaluasi dilakukan dengan memanfaatkan teori-teori yang relevan untuk menilai implementasi kebijakan tersebut. Secara umum, berikut adalah beberapa kesimpulan utama:

Pertama, meskipun Kota Gorontalo telah menetapkan kebijakan yang jelas mengenai pengelolaan sampah, implementasinya belum mencapai tingkat optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat akan manfaat dari kebijakan ini, terutama dalam memanfaatkan fasilitas seperti TPS3R dan Bank Sampah yang telah disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Gorontalo. Keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan masih perlu ditingkatkan melalui pendekatan edukasi yang lebih intensif dan kampanye yang efektif.

Kedua, infrastruktur yang ada, seperti jumlah armada pengangkut sampah, juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan. Meskipun DLH Kota Gorontalo telah menyediakan armada, jumlahnya masih belum memadai untuk mengatasi volume sampah yang dihasilkan, terutama di wilayah perkotaan yang padat penduduk. Saran untuk menambah jumlah armada pengangkut sampah menjadi 73 armada dari sebelumnya 53 armada diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengangkutan sampah dan memastikan kebersihan kota terjaga dengan baik.

Berdasarkan temuan-temuan ini, beberapa saran dapat diusulkan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Kota Gorontalo. Pertama, DLH Kota Gorontalo perlu meningkatkan penegakan aturan dengan memberlakukan sanksi yang tegas bagi pelanggaran terhadap kebijakan pengelolaan sampah, seperti denda bagi warga yang membuang sampah sembarangan atau terlambat membayar retribusi sampah. Kedua, perlu dilakukan penguatan dalam memanfaatkan TPS3R untuk mendukung ekonomi masyarakat setempat, sehingga kehadiran TPS3R tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan tetapi juga bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Ketiga,



pentingnya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara terus-menerus melalui berbagai platform, termasuk media sosial, guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi aktif dalam menjaga lingkungan bersih.

**Keterbatasan Penelitian.** Keterbatasan penelitian ini terletak pada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk pemahaman yang lebih baik terhadap hasilnya. Pertama, penelitian ini terbatas pada wilayah geografis tertentu yaitu Kota Gorontalo, sehingga generalisasi temuan ke wilayah lain perlu dilakukan dengan hati-hati. Kedua, meskipun telah dilakukan upaya maksimal dalam pengumpulan data melalui observasi dan wawancara, namun keterbatasan aksesibilitas terhadap beberapa informan atau data tertentu dapat mempengaruhi kedalaman analisis. Ketiga, waktu penelitian yang terbatas juga membatasi dalam mengamati perubahan jangka panjang atau efek dari implementasi saran yang diusulkan. Namun demikian, upaya mitigasi telah dilakukan dengan cermat dalam merancang metodologi dan menganalisis data yang diperoleh untuk meminimalkan dampak dari keterbatasan tersebut terhadap kesimpulan penelitian. Dengan memahami keterbatasan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami tantangan dan potensi solusi dalam pengelolaan sampah di konteks Kota Gorontalo, serta menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang ini.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Untuk mengembangkan penelitian ini ke depan, ada beberapa arah yang bisa dieksplorasi lebih lanjut. Pertama, penelitian lebih lanjut dapat difokuskan pada implementasi dan evaluasi efektivitas dari saran-saran yang telah diajukan dalam penelitian ini, seperti penambahan armada pengangkut sampah dan penerapan sanksi bagi pelanggar aturan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengamati perubahan dalam pola pembuangan sampah dan respons masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan. Kedua, penting untuk memperluas cakupan penelitian ke aspek-aspek lain yang relevan dalam pengelolaan sampah, seperti keberlanjutan dari program TPS3R dalam meningkatkan ekonomi masyarakat setempat atau analisis dampak lingkungan dari strategi pengelolaan sampah yang diterapkan. Selain itu, penelitian masa depan dapat mengeksplorasi lebih dalam mengenai faktor-faktor sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pengelolaan sampah, serta efektivitas dari upaya penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan pandangan lebih luas terhadap kompleksitas masalah pengelolaan sampah di Kota Gorontalo, tetapi juga memberikan dasar yang kuat untuk perbaikan kebijakan dan praktik di masa mendatang.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk terlibat dalam penelitian ini. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan wawasan selama proses penelitian. Tanpa kerjasama dan kontribusi dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan terwujud dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat

dan kontribusi positif bagi pengembangan kebijakan dan penataan tenaga kerja di masa mendatang. Terima kasih atas waktu, dukungan, dan kerja sama yang telah diberikan. Semoga kita dapat terus berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arkum, D., Handini, W., & Kurniawan, R. (2023). Optimalisasi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Pangkalpinang. *Jurnal Studia Administrasi*, 5(2). <https://doi.org/10.47995/jian.v5i2.197>
- Bungin, B. (2007). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya. In *Kencana*.
- Creswell. J. W. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design. (Fourth Edition)*. SAGE Publications.
- Dunn, William. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Penerjemah: Wibaw, Samodra, dkk. *Cetakan Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fitri, S. E., & Ferza, R. (2020). Dinamika, Problematika, Dan Implikasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Plastik Di Daerah. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 15(1). <https://doi.org/10.47441/jkp.v15i1.40>
- Hardiyanti, K., Purnaweni, H., & Sundarso, S. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di TPA Kalikondang Kabupaten Demak. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(1). <https://doi.org/10.31289/publika.v9i1.4301>
- Hastuti, B. D., Anwar, F., & Titi, T. D. (2021). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Bengkulu Selatan. *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 2(2). <https://doi.org/10.33830/jiapi.v2i2.70>
- L.J Moleong. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Issue Maret).
- Mulasari, S. A., Husodo, A. H., & Muhadjir, N. (2014). Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Domestik. *Kesmas: National Public Health Journal*, 8(8). <https://doi.org/10.21109/kesmas.v8i8.412>
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Yogyakarta Press*.
- Noviyanti, N., Noviani, H. I., Octaviasari, S., Kemalia, N., Bargoyah, F., Baihaqy, D., & Zulfa, P. S. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Induk Surabaya (Studi Di Bank Sampah Unit Kelurahan Ngagelrejo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya). *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(1). <https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i1.2997>
- Nurlina, L., Muhafidin, D., & Sukarno, D. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN BANDUNG (STUDI KASUS DI WILAYAH PELAYANAN SAMPAH SOREANG). *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 13(1). <https://doi.org/10.24198/jane.v13i1.28690>
- Okhtafianny, T., & Ariani, R. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Payakumbuh. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (JEBMA)*, 3(2). <https://doi.org/10.47709/jebma.v3i2.2837>
- Rijali, A. (2019). ANALISIS DATA KUALITATIF. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33). <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>



- Soeharsono, A., Hamdi, M., Maryani, D., & Masrich, M. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berorientasi Lingkungan Hidup Strategis di Kota Bogor. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(1). <https://doi.org/10.35931/aq.v17i1.1798>
- Wijaya, H., Nurasa, H., & Susanti, E. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA CIMAHI (STUDI KASUS DI WILAYAH PELAYANAN SAMPAH LEUWIGAJAH). *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 13(2). <https://doi.org/10.24198/jane.v13i2.38130>
- Wira Utama, I. P. (2023). POLICY PAPER KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI PROVINSI BALI: PROBLEMATIKA DAN SOLUSI. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1). <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.121>

